



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 234/17122008
HARI : RABU
TANGGAL : 17 DESEMBER 2008

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	INTERNASIONAL	
	Dana Moneter Asia Senilai US\$120 Miliar Disepakati Pebruari	3
	Abhisit Hadapi Tugas yang Berat	3
	DK PBB: Proses Perdamaian Israel-Palestina Tak Dapat Diubah	4
	Income gap widens in Indonesia, most other countries: ILO	5
	Obama Diminta ke Indonesia	6
	Spesies Baru Ditemukan dalam 10 Tahun Terakhir	7
II.	NASIONAL	
	A. POLITIK	
	PESTA DEMOKRASI: Pemilu 2009 Terancam Gagal	7
	Komnas Perempuan Desak Ratifikasi Konvensi Pekerja Imigran	9
	Distribution of recovery aid for Aceh uneven: WB	9
	B. EKONOMI	
	Ekonomi 2009 Sulit Tumbuh	10
	NZ free trade deal offers insufficient: Agriculture Minister	11
	C. SOSBUD	
	Indonesia to be bird flu free by 2014: Agriculture Ministry	12

		Olimpiade Sains: Indonesia Raih Prestasi Prestisius di IJSO	12
	D.	HANKAM	--
	E.	HUKUM	
		Gagal Bertemu Adrian, Jaksa Gigit Jari	13
		LEGISLASI DPR Sahkan UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan	13
	F.	OLAHRAGA	
	G.	LINGKUNGAN HIDUP	
		Kembalikan Hutan Indonesia dengan Penanaman Kembali	14
	III.	ARTIKEL	
		Susahnya Melawan Rasisme (Oleh Tom Saptaatmaja)	15
		Piracy an extension of Somalia's lawless land (by Rama Anom Kurniawan)	17
	IV.	LAIN-LAIN	--
	V.	EDITORIAL	
		Piagam Bersejarah ASEAN	18

Jakarta, 17 Desember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media

I. INTERNASIONAL :

1. Dana Moneter Asia Senilai US\$120 Miliar Disepakati Pebruari

Dana Moneter Asia senilai 120 miliar dolar siap disepakati pada pertemuan puncak regional pada Pebruari, Menlu Malaysia, Rais Yatim, menyatakan, seperti dilaporkan media, Rabu.

Prakarsa tersebut, berdasarkan model Dana Moneter Internasional dan diperdebatkan sejak berlangsungnya krisis finansial Asia 1997-98 yang merontokkan perekonomian negara-negara Asia yang sedang tumbuh, dapat dimanfaatkan bila krisis serupa berulang lagi.

"Masalah tersebut sedang dibahas dalam pertemuan menkeu ASEAN di Singapura pada saat ini dan kami akan menerima hasilnya segera," kata Rais, seperti dilaporkan kantor berita Bernama.

"Namun demikian, kami telah memperoleh informasi dana itu akan menjadi kenyataan saat pertemuan puncak ASEAN digelar Pebruari nanti," katanya.

Para pemimpin 10 negara Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) akan bertemu dengan mitra dialog mereka, antara lain China, Jepang dan Korea Selatan, di Bangkok pada 24-26 Pebruari.

Dikatakannya saat dunia menghadapi penurunan tajam ekonomi, kini muncul "kemauan politik" untuk mewujudkan Dana Moneter Asia yang sudah lama dibahas. (ANTARA)

2. Abhisit Hadapi Tugas yang Berat

Perdana Menteri baru Thailand Abhisit Vejjajiva menghadapi tugas yang sulit untuk menyatakan negeri yang terkoyak-koyak akibat demonstrasi selama berbulan-bulan tersebut.

Terpilihnya pemimpin Partai Demokrat ini mengakhiri delapan tahun pengaruh mantan PM Thaksin Shinawatra, yang dijatuhkan lewat kudeta 2006 dan kini mengasingkan diri akibat tuduhan korupsi.

Abhisit mulai Selasa menyiapkan kabinet bersama, yang akan berjuang menghentikan pertentangan di antara masyarakat kelas menengah dan masyarakat miskin di pedesaan, yang selama ini menjadi basis pendukung Thaksin.

"Ini akan lebih sulit bagi Demokrat untuk mencapai hasil yang lebih cepat dalam menangani krisis dibanding pada 1997," kata Ekamol Khirawat, mantan pemimpin bursa efek Thailand.

Abhisit, yang memiliki latar belakang ekonomi yang kuat, diharapkan akan membentuk tim ekonomi yang solid saat jajaran kabinetnya diumumkan, kemungkinan pada Jumat mendatang.

Menyusul terpilihnya Abhisit, Vietnam mengucapkan selamat terhadap pemimpin baru itu. Hanoi berharap pemerintah baru mampu menstabilkan situasi di kerajaan tersebut.

"Kami berharap pemerintah baru Thailand akan segera memulihkan situasi dan mewujudkan pembangunan nasional," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Le Dung, menurut surat kabar milik negara Vietnam News. "Vietnam berharap melanjutkan kerja sama dengan pemerintah Thailand," katanya.

Senada dengan itu, pemerintah China juga menyambut Abhisit sebagai perdana menteri baru Thailand. "Kami mengucapkan selamat atas terpilihnya Abhisit sebagai perdana menteri baru Thailand dan berharap kedua negara tetap bisa meningkatkan hubungan bilateral," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Liu Jianchao dalam keterangan pers berkala di Beijing, Selasa.

Menurutnya, dengan terpilihnya PM baru Thailand tersebut diharapkan bisa membawa kesejahteraan, keamanan dan keadilan bagi negara dan rakyat Thailand.

Selain itu, kata dia, sebagai negara yang bertetangga baik, China juga siap melakukan peningkatan hubungan bilateral atas dasar saling menguntungkan dan bermanfaat bagi negara dan masyarakat kedua negara.

Sementara itu, Pemerintah Thailand menyatakan sudah mencabut paspor diplomatik mantan PM Thaksin Shinawatra, sesaat setelah Abhisit terpilih sebagai PM baru.

Penarikan paspor itu adalah yang terahir dari rentetan hukuman terhadap Thaksin, termasuk penjatuhan hukuman tanpa kehadiran sampai dua tahun di penjara atas tuduhan korupsi dan pembekuan hartanya.

"Kementerian ini sudah mempertimbangkan masalahnya dengan cermat, karena berhubungan dengan unsur hukum dan politik," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Thailand.

Pada awal November lalu, pemerintah Inggris mencabut visa Thaksin dan isterinya Pojaman, kata pejabat perusahaan penerbangan kepada kantor berita Prancis AFP.

Pejabat itu, yang berbicara tanpa bersedia disebut namanya, menyatakan kedutaan Inggris memberitahu semua perusahaan penerbangan melalui surat-elektronik bahwa pihaknya tak lagi mengizinkan pasangan itu terbang ke Inggris.

"Kedutaan Inggris mengirimkan surat elektronik ke semua perusahaan penerbangan. Itu berlaku umum terhadap semua penerbangan, sehingga tak ada perusahaan bisa membawanya kembali ke Inggris dari bandar udara mana pun," katanya. (Suara Karya)

3. **DK PBB: Proses Perdamaian Israel-Palestina Tak Dapat Diubah**

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Selasa (Rabu 17/12 WIB), menyetujui sebuah resolusi yang menegaskan bahwa proses perdamaian Israel-Palestina yang digagas Amerika Serikat (AS) tahun lalu tidak dapat diubah.

Dewan juga mendesak agar ada upaya intensif untuk mencapai perdamaian di seluruh Timur Tengah.

Marty Natalegawa, Duta Besar RI di Markas Besar PBB mengatakan Indonesia selama dua bulan terakhir mendekati AS terutama untuk meyakinkan perlunya suatu resolusi DK soal Palestina. "Intinya mengingat proses perdamaian dalam tahap yang penting. Adanya perubahan pemerintahan di AS dan akan adanya pemilu di Israel. Kita berkeyakinan waktunya sangat tepat agar DK-PBB mengeluarkan resolusi untuk mengkonsolidasi proses perundingan pada tahap saat ini. Dan kemudian mau ke arah mana ke depan," kata Marty kepada SH, Rabu (16/12).

Selain AS, Indonesia juga melobi negara-negara DK lainnya. "Akhirnya kita berhasil meyakinkan AS bahkan menyadarkan unsur-unsur rancangan resolusi kepada pihak-pihak yang terkait hingga pada hari Sabtu AS dan Rusia mengambil inisiatif mengeluarkan rancangan resolusi dan disahkan," katanya. Resolusi terakhir tentang Palestina dikeluarkan tahun 2004.

Hasil pemungutan suara di DK PBB 14-0, dengan Libya menyatakan abstain.

Resolusi—yang disponsori bersama AS dan Rusia—mendukung "upaya-upaya penetapan" oleh Israel dan Palestina untuk merampungkan perjanjian perdamaian dan memenuhi visi bahwa mereka dapat hidup berdampingan dengan damai sebagai negara demokratis yang merdeka.

Perundingan yang diluncurkan Presiden George W Bush di Annapolis, Maryland, November 2007 menyerukan agar Israel dan Palestina berusaha mencapai kesepakatan perdamaian hingga akhir 2008.

Sasaran itu telah memberi kemenangan diplomatik bagi Bush sebelum ia meninggalkan jabatan—yang belum terjadi, meski telah berbulan-bulan perundingan intensif dilakukan.

Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon mengatakan, seluruh anggota DK PBB menyesali perjanjian itu belum tercapai tahun ini, namun ia mengatakan "sebuah proses serius masih berlangsung" dan komunitas internasional harus memastikan pembicaraan itu mencapai suatu hasil. Baik Israel maupun Palestina menyambut baik resolusi itu.

Riyad Mansour, pemantau Palestina di PBB, menyatakan harapan bahwa kedua pihak akan menyingkirkan "seluruh rintangan" dan mencapai perjanjian perdamaian di 2009. Ia mengatakan bahwa pihak Palestina senang bahwa DK PBB—yang tidak menerapkan resolusi komprehensif untuk Timur Tengah sejak November 2003—telah berperan dengan aktif.

Ketidakpastian Politik

Di Yerusalem, Menteri Luar Negeri (Menlu) Tzipi Livni yang menjadi ketua perunding Israel sejak pertemuan Annapolis, mengatakan resolusi ini memberi "penguatan internasional" yang penting bagi upaya perdamaian.

"Dukungan jelas DK PBB merupakan suatu suara kepercayaan akan proses di Israel mencapai kemajuan dengan kepemimpinan Palestina yang sah," kata Livni.

Livni menegaskan perundingan akan berlanjut, namun pembicaraan harus disertai upaya

Pemerintah Palestina dalam menumpas kaum militan dan mengakhiri kendali kelompok militan Hamas terhadap Jalur Gaza.

Dalam kemunculannya di PBB, yang mungkin terakhir kali, Menlu AS Condoleezza Rice menyatakan perundingan yang lahir di Annapolis “memberinya kepercayaan” bahwa tujuan kemerdekaan negara Israel dan Palestina hidup damai dan aman “bukan hanya sekadar visi, namun sebuah komitmen para pihak dan komunitas internasional.”

Menlu Rusia Sergey Lavrov menekankan isu ini menjadi pusat konflik yang begitu kompleks dan membutuhkan “kehendak politik serta keberanian” untuk menyelesaikannya.

Sementara itu ketidakpastian politik pada kedua pihak juga masih membayangi. Israel menuju pemilihan umum Februari, calon terdepannya adalah Benjamin Netanyahu, yang menyambut dingin proses Annapolis. Sedang Palestina, tidak sepakat mengenai masa jabatan mitra perunding Israel, yakni Presiden Mahmoud Abbas, yang akan berakhir. Hamas menyatakan Abbas harus turun pada Januari, meski ia telah bersumpah akan bertahan pada jabatannya. (Sinar Harapan)

4. Income gap widens in Indonesia, most other countries: ILO

Indonesia, along with most countries in the world, has seen the gap between the salaries of its workers widen in the past two decades, a condition that is protracted in Indonesia’s case because its informal sector absorbs such a large portion of the total work force, an ILO study has revealed.

In its World of Work Report 2008, the International Labor Organization (ILO) said about two-thirds of more than 70 developed and developing countries surveyed had seen the incomes of their richer households increase relative to those of middle class and low-income households.

The report, drawn up by the ILO’s International Institute for Labor Studies, also reveals the gap between salaries of top executives and the average employee in Indonesia is widening at an increased rate.

CEOs of the 15 largest companies in the United States, for example, earned 520 times more than the average workers at their respective companies in 2007, up from 360 times in 2003, it added.

“Income inequality has been increasing especially in advanced countries like the U.S. and Nordics; but also in emerging economies such as Eastern Europe, China and Indonesia,” the institute’s lead economist Ekkehard Ernst said in a discussion on the report in Jakarta on Tuesday.

“In Indonesia, the incidence of informal employment remains significant and is on the rise,” said Ernst, adding that a shift toward informal forms of employment was among the factors widening the inequality.

Ernst said some disparity between incomes was necessary as a way to reward work effort and talent, and to encourage innovation, but he warned that excessive inequality would lead to social unrest and economic inefficiencies.

Bambang Widianto, a deputy to the state minister for national development planning, said Indonesia’s Gini coefficient (a measure of the inequality of income distribution, in which a lower index indicates better equality) had risen to 0.368 in 2008 from 0.311 in 1999.

Of the country’s 49.67 million workers, about 70 percent are employed in the informal sector, and in particular by micro and small enterprises, he said.

Bambang said informal-sector workers received an average salary of Rp 603,000 (US\$54) per month, one-quarter of the average amount earned by employees at medium and large enterprises.

“This shows an evident inequality of income,” he said, adding that while formal workers had seen their salaries rise by 20 percent on average since 1999, the salaries of informal workers had not matched the rate of increase.

Indonesian Employers Association chairman Sofjan Wanandi said he was aware of the widening income gap between rich and poor people in the country.

But the gap, he said, was not as severe as in the United States, which had a Gini coefficient of 46.3 in 2007.

Sofjan said there should be policies put in place to employ more people in the formal sector to oppose the widening of the gap.

Indonesian Labor Union Confederation vice president Thamrin Mosii said that formal jobs were not necessarily secure as many were employed on contract-based systems and were thus

vulnerable to mass layoffs that have been forecast to hit the country next year due to the global financial crisis.

An economist at ILO's Jakarta office, Kee Beom Kim, forecast that between 170,000 and 650,000 Indonesian workers would be laid off next year, which would increase the country's unemployment rate, currently 8.46 percent, by 1 percent. (The Jakarta Post)

5. **Obama Diminta ke Indonesia**

Ketika berkampanye, Barack Obama berjanji dalam 100 hari pertama menjabat Presiden AS dia akan melakukan kunjungan ke negara-negara Islam. Kunjungan tersebut untuk menyampaikan pesan-pesan mengenai kebijakan Amerika Serikat (AS) yang baru terhadap dunia Islam.

Menurut Michael Fullilove dari Brookings Institute di Washington, Mesir, Turki, dan Qatar adalah negara-negara yang mungkin akan disinggahi Obama. Namun, lanjut Fullilove, Indonesia adalah negara mayoritas Islam yang paling pas bagi Obama untuk dikunjungi pertama kali.

"Memilih Indonesia akan mencerminkan keanekaragaman dan kekayaan Islam yang bertolak belakang dengan persepsi yang muncul selama ini, yang datang dari negara-negara Arab atau Timur Tengah," tulis Fullilove di New York Times edisi kemarin. Indonesia, menurut Fullilove, mampu dengan baik menata heterogenitas agama yang begitu beragam.

Dan kunjungannya ke Indonesia akan membantu Obama mengubah alur perdebatan di Barat mengenai Islam dan terorisme. "Indonesia juga menjadi contoh yang bagus karena rakyat Indonesia telah menjadi korban dan sekaligus pelaku serangan teroris, termasuk pengeboman Bali.

Pemerintah Indonesia adalah mitra penting dalam perang melawan terorisme," lanjut Fullilove. Dia menambahkan, dengan kunjungan ke Indonesia, Obama akan membuktikan bahwa dia memperhatikan demokrasi dengan serius jika dilihat dari demokrasi yang baru tumbuh di negara ini.

Selain itu, kehadiran Obama di Indonesia akan membantu menghalau pandangan anti-Amerika. "Siapa yang menyangka bahwa Amerika Serikat akan memilih seorang presiden yang pernah berjalan tanpa alas kaki di sawah-sawah dan mendengar suara azan di malam hari?" tulis Fullilove, direktur program isu global Lowly Institute di Sydney yang kini menjadi visiting fellow di Brookings Institute, Washington.

Pandangan Fullilove ini mendukung hasil polling yang dilakukan WorldPublicOpinion.org kemarin yang menyebutkan bahwa pendekatan AS di Timur Tengah dan negara-negara Islam kurang mendapat simpati di seluruh dunia.

"Dukungan AS terhadap demokrasi di dunia Islam dianggap terbatas hanya pada pemerintahan yang bisa bekerja sama dengan AS dan semakin banyak yang yakin AS tidak serius berusaha membentuk negara Palestina," tulis hasil laporan ini. Sementara itu, Barack Obama kemarin menunjuk pakar ilmu fisika penerima hadiah Nobel 1997 Steven Chu sebagai menteri energi.

Nantinya, Chu bakal memimpin tim baru untuk menghadapi pemanasan global dan menghentikan ketergantungan AS pada minyak asing. Sebagai menteri energi, satu-satunya menteri keturunan China itu bakal mewujudkan agenda ambisius Obama, yaitu menciptakan 2,5 juta pekerjaan baru melalui pemanfaatan teknologi "hijau" dan baru yang ramah lingkungan.

"Kita tahu bahwa Washington telah meluncurkan kebijakandemikebijakan. Kinikebergantungan minyak dari luar negeri begitu besar, padahal sumber minyak berangsurangsur semakin sedikit," ujar Obama. Dia menuturkan, AS harus mengembangkan tenaga angin dan matahari, pasukan baru, dan teknologi baru.

Obama juga memasang Lisa Jackson, Kepala Staf Gubernur New Jersey, sebagai Kepala Badan Perlindungan Lingkungan. Obama pun telah menunjuk Carol Browner yang menjabat administrator EPA (Lembaga Perlindungan Lingkungan Hidup) di masa Presiden Bill Clinton untuk menduduki posisi baru sebagai penasihat Gedung Putih.

Dia akan mengawasi perjuangan melawan pemanasan global. Selanjutnya, Nancy Sutley, penasihat senior tim peralihan Obama, ditunjuk sebagai pemimpin Dewan Kualitas Lingkungan Gedung Putih. Obama juga bakal menunjuk CEO The Chicago Public Schools, Arne Duncan, sebagai menteri pendidikan dan Senator Ken Salazar sebagai menteri dalam negeri. (Koran Sindo)

6. Spesies Baru Ditemukan dalam 10 Tahun Terakhir

Para ilmuwan menemukan lebih dari 1.000 spesies baru di wilayah "Greater Mekong Asia" di Asia Tenggara dalam satu dasawarsa terakhir, termasuk satu laba-laba sebesar piring makan, demikian keterangan Dana Margasatwa Dunia (*WWF*), Senin.

Satu spesies tikus yang diduga telah punah 11 juta tahun lalu dan "millipede" ungu yang berlapis-sianida termasuk di antara makhluk yang ditemukan dalam isitilah yang dikatakan kelompok tersebut sebagai "harta karun berharga biologi".

"Millipede (dari jenis "Diplopoda", yang dulu juga dikenal sebagai "Chilognatha") adalah "arthropoda" yang memiliki sepasang kaki per bagian tubuh, kecuali bagian pertama di belakang kepala yang sama sekali tak memiliki anggota tubuh, dan beberapa bagian berikutnya hanya memiliki satu pasang kaki.

Semua spesies itu ditemukan di hutan hujan dan tanah lembab di sepanjang Sungai Mekong, yang mengalir melalui Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan provinsi Yunnan di China selatan.

"Tak lebih baik daripada ini," kata Stuart Chapman, Direktur Program Greater Mekong di *WWF*, sebagaimana dikutip dalam satu pernyataan kelompok tersebut.

"Kami kira temuan skala ini terbatas pada buku sejarah saja," katanya.

Laporan *WWF* tersebut, Kontak Pertama di Greater Mekong, menyatakan, "Antara 1997 dan 2007, sedikitnya 1.068 spesies telah secara resmi digambarkan oleh ilmu pengetahuan sebagai spesies yang baru ditemukan."

Semua spesies itu meliputi laba-laba "huntsman" terbesar di dunia, dengan rentang kaki 30 centimeter, dan "dragon millipede" warna-warni, yang menghasilkan zat sianida mematikan.

Tidak semua spesies ditemukan sedang bersembunyi di hutan terpencil tikus karang Laos, yang dikatakan dalam studi itu diduga telah punah sekitar 11 juta tahun lalu, pertama kali ditemukan oleh ilmuwan di pasar makanan lokal pada 2005, katanya.

Satu spesies, "pitviper", pertama kali dilihat oleh para ilmuwan setelah hewan tersebut ditemukan di kaso di satu restoran di markas taman nasional Khao Yai, Thailand, pada 2001.

"Wilayah ini seperti apa yang saya baca saat masih kanak-kanak dalam cerita Charles Darwin," kata Dr. Thomas Ziegler, kurator di Kebun Binatang Cologne, yang terlibat dalam penelitian itu.

"Sungguh menyenangkan untuk berada di daerah belum dieksplorasi dan mendokumentasikan keragaman hayatinya untuk pertama kali, baik secara enigmatik dan cantik," katanya.

Spesies baru tersebut yang disoroti dalam laporan itu meliputi 519 tanaman, 279 ikan, 88 katak, 88 laba-laba, 46 cecak, 22 ular, 15 mamalia, 4 burung, 4 kura-kura, dua kadal dan satu kodok rata-rata dua spesies yang belum ditemukan per pekan selama 10 tahun terakhir.

Namun, laporan itu memperingatkan bahwa banyak spesies mungkin terancam akibat pembangunan, dan menyerukan dicapainya kesepakatan lintas-perbatasan antara negara-negara di daerah Greater Mekong untuk melindunginya. (Media Indonesia)

I I .

NASIONAL :

A. POLITIK :

1. PESTA DEMOKRASI: Pemilu 2009 Terancam Gagal

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 terancam gagal. Sebab, sejumlah pihak meragukan persiapan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Demikian rangkuman pendapat Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita, Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo, dan Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jeirry Sumampow yang disampaikan secara terpisah, di Jakarta, kemarin.

Menurut Ginandjar, DPD meragukan pelaksanaan Pemilu 2009 berlangsung mulus, karena persiapannya dinilai masih karut-marut.

"Persiapan pelaksanaan pemilu belum terlihat memberikan gambaran yang meyakinkan dan menjamin tercapainya sasaran dari pemilu itu sendiri," kata Ginandjar dalam sambutan pembukaan diskusi refleksi akhir tahun bertema "Pemberdayaan Daerah dalam Konteks Politik

Nasional", yang dibacakan Wakil Ketua DPD Laode Ida, di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (16/12).

Keraguan tersebut, kata Ginandjar, dapat dilihat dari adanya sikap toleransi jadwal penetaan organisasi peserta pemilu (OPP), penambahan OPP, penetapan daftar calon tetap (DCT), penetapan daftar pemilih (PDP), dan lain-lain. "Dari semua itu tidak tergambar optimisme bahwa pemilu akan berlangsung baik," ujarnya.

Bukan itu saja, masih akan muncul persoalan lagi terkait dengan UU Pemilu yang dijadikan pijakan dan yang telah di-judicial review oleh DPD, di samping persoalan penetapan caleg terpilih dengan sistem nomor urut DCT atau dengan perolehan suara terbanyak.

Dari situ, menurut Ginandjar, ada perbedaan realitas politik dan penetapan dalam UU yang isunya terus berkembang. Di sisi lain, terjadinya perubahan dalam teknik kampanye, menurut UU Pemilu 2008, menyebabkan kegiatan kampanye politik yang telah diawali sejak Juli 2008 memberikan konfigurasi baru sistem kampanye terutama melalui iklan yang memakan biaya cukup besar.

Kampanye presiden pun demikian. Jadi, ucap Ginandjar, perlu diobservasi lagi persoalan yang terjadi untuk memperoleh sistem politik. "Apalagi persiapan logistik pemilu yang masih terus dibahas, terutama tentang dukungan distribusi logistik dan persoalan tender dan lainnya," katanya.

Pada sisi lain, persoalan Pilkada Jatim, menurut Ginandjar, juga menjadi masalah baru yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009.

Sedangkan masalah perilaku politik juga menjadi catatan sendiri bagi DPD. Ginandjar mengatakan, sikap kritis masyarakat semakin menguat terhadap parlemen, terutama DPR.

DPD, tutur dia, juga merasakan bahwa sikap kritis publik kepada DPR juga ditujukan kepada DPD. Meski ikut terimbas, lembaga yang dipimpinnya itu terus melakukan kerja-kerja politik secara lebih baik dan diupayakan berkembang dari waktu ke waktu dalam usia DPD yang masih muda.

Hal senada juga disampaikan sejumlah pimpinan partai politik yang juga menjadi calon presiden yang akan mengikuti Pemilu 2009 mendatang.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo mengatakan, Pemilu 2009 harus tetap terselenggara tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku. Karena itu, KPU harus mengatasi keteringgalan mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya.

Karena itu, apa pun yang terjadi, Pemilu 2009 harus tetap dilaksanakan. Dan, para anggota KPU jangan berleha-leha dengan bepergian ke luar negeri atau tidak mengerjakan persiapan secara matang.

"Dalam hal ini, tanggung jawab KPU sangat besar. Mereka harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu dengan matang. Jadi, jangan ada anggotanya yang berleha-leha, apalagi sampai ke luar negeri hanya untuk sekedar sosialisasi. Sebab, kalau jadwal pemilu bergeser maka hal ini akan mengganggu agenda politik yang lain serta mengganggu suksesi kepemimpinan," kata Firman lagi.

Untuk itu, dia mengimbau pimpinan dan anggota KPU untuk tetap konsentrasi pada tugas mereka, mengawal penyelenggaraan pemilu sampai selesai.

Secara terpisah, Ketua Dewan Pembina Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto mengatakan, dirinya memahami kekhawatiran masyarakat bahwa Pemilu 2009 akan berlangsung ricuh karena banyaknya kendala mulai dari perundang-undangan sampai pelaksanaan dan pengawasan pemilu yang belum siap.

Sedangkan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengatakan, Pemilu 2009 mendatang akan sangat rawan akibat kondisi ekonomi rakyat yang sedang sulit. Karena itu, dia berharap agar pemerintah sebagai pemegang kendali keamanan dapat menjaga hal ini.

Sementara itu, Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Jerry Sumampow, mengatakan, kondisi Pemilu 2009 masih belum "aman".

Menurut dia, salah satu faktor yang mengindikasikan itu, yakni masalah tenaga pengawas pemilu yang minim akibat keterlambatan pembentukan panitia pengawas (panwas). Kemudian, juga soal anggaran hingga kapasitas sumber daya manusia (SDM) panwas.

Di lain pihak, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary mengatakan, sosialisasi pemilu yang dilaksanakan penyelenggara pemilu maupun oleh instansi terkait sudah maksimal.

"Sosialisasi telah dilaksanakan hampir di seluruh Tanah Air," katanya, di Gedung KPU Jakarta, kemarin. Pernyataan tersebut diungkapkan Hafiz Anshary menanggapi masih adanya kritikan dari sejumlah kalangan masyarakat.

Sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan menggelar kesenian tradisional. Dalam pertunjukan kesenian tersebut disisipkan informasi mengenai Pemilu 2009. (Suara Karya)

2. Komnas Perempuan Desak Ratifikasi Konvensi Pekerja Imigran

KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah dan DPR, melakukan perlindungan maksimal terhadap pekerja migran dengan meratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak pekerja migran dan keluarganya.

"Ini adalah satu-satunya konvensi internasional tentang hak-hak buruh yang belum diratifikasi Indonesia. Padahal Indonesia memiliki kepentingan yang besar untuk melindungi para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri," kata Komisioner Komnas Perempuan Sri Wiyanti Eddyono, di Jakarta, Rabu (17/12).

Dari tahun ke tahun, kasus kekerasan terhadap para pekerja migran asal Indonesia, terlebih pekerja perempuan, masih terus terjadi.

Pekerja migran perempuan kerap kali mendapat diskriminasi dan eksploitasi dari para majikan di negara-negara tujuan TKI, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Singapura.

"Oleh karena itu pemerintah dan DPR harus segera meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Pekerja Migran dan Keluarganya (1990)," katanya.

Menurut Wiyanti, tidak satupun implikasi buruk yang bakal dihadapi Indonesia apabila meratifikasi konvensi itu, bahkan sebaliknya Indonesia akan memiliki posisi tawar yang kuat untuk bekerja sama dengan negara tujuan buruh migran dengan standar HAM internasional.

Konvensi ini, katanya, juga mencegah dan membatasi eksploitasi buruh migran dan anggota keluarganya dari kegiatan ilegal seperti perdagangan manusia.

Meskipun Komnas Perempuan mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur pekerja migran, namun reformasi sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja itu baru mencakup masalah penempatan, belum perlingkungannya.

"UU No.39/2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia mempunyai kelemahan utama hanya menitikberatkan pada penempatan tenaga kerja. Cara pandang pemerintah masih menempatkan pekerja migran sebagai komoditi dan solusi pemecahan masalah pengangguran, serta mendapatkan remitan," katanya.

Padaahal, demi mendapatkan beberapa juta rupiah, pekerja terutama pekerja migran perempuan yang bekerja di sektor domestik (pembantu rumah tangga) harus menanggung resiko pelecehan, penyalahgunaan, dan eksploitasi, karena minimnya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. (Jurnal Nasional)

3. Distribution of recovery aid for Aceh uneven: WB

An ineffective relief and recovery system has led to uneven distributions of disaster-relief funds for reconstruction projects post the tsunami disaster in 2004, a World Bank expert said Tuesday.

Jock McKeon, the bank's Aceh-based financial analyst, said that while the education and health sectors in Aceh had received more financial support than they needed to recover from the tsunami, other sectors, including environment, energy and infrastructure had "consistently" received inadequate funding.

He said NGOs operating in the region had focused too heavily on short-term relief.

"Donors and the government programs tend to look at longer-term reconstruction programs, such as in the energy and infrastructure sectors. However, NGOs have tended toward more short-term projects, like health and education.

"So a lot of the NGOs' money has gone in particular into these two sectors. There is really an uneven split in where the NGOs channel their money to," McKeon said on the sidelines of a book launch by the World Bank and the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

The book, entitled Data Against Natural Disasters, highlights the critical need for effective systems in post-disaster areas to ensure aid effectiveness.

It reviews the success and failures of efforts to establish innovative monitoring systems in post-disaster Guatemala, Haiti, Indonesia, Mozambique, Pakistan and Sri Lanka.

The chapter on Indonesia describes the methodology used by the World Bank to track nearly US\$8 billion worth of funds for the post-tsunami reconstruction of Aceh and Nias.

McKeon, who wrote the chapter on Indonesia, said the channeling of the funds had been assessed annually during meetings of the Coordination Forum for Aceh and Nias, organized by the Rehabilitation and Reconstruction Agency (BRR), in which information on the latest issues regarding where the government, donors and NGOs would channel money was shared.

The forum, he said, appeared to have failed to guide NGOs to reallocate their funds.

Priyadi Kardono, data and information division head at the National Disaster Management Agency (BNPB), said the government, through either the BRR or the now-defunct National Disaster Management Coordinating Agency, had yet to maximize its power to coordinate the aid distributions in Aceh.

However, he said the establishment of the BNPB in January would hopefully boost coordination among the government, donors and NGOs.

The tsunami that devastated Aceh and Nias is estimated to have cost a total of US\$4.5 billion in losses, or 2.2 percent of Indonesia's GDP.

The infrastructure sector received most of the reconstruction funds, amounting to \$2.87 billion, followed by the social sector (including health and education), \$1.55 billion, the productive sector (such as agriculture and enterprises), \$645 million and other sectors, \$630 million. So far, only about 50 percent of the funds have been channeled.

The post-tsunami reconstruction funds for Aceh and Nias were partly provided by more than 130 donor countries (\$2.1 billion), the Indonesian government (\$1.9 billion) and NGOs (\$1.6 billion). (The Jakarta Post)

B. EKONOMI

1. Ekonomi 2009 Sulit Tumbuh

Ekonom Iman Sugema mengatakan ada tiga risiko krisis dunia yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan.

Ketiga risiko tersebut yakni krisis properti di negara-negara maju, krisis finansial, dan krisis komoditas. "Tahun 2009 merupakan tahun terburuk, 2008 belum mencapai puncak, paling cepat akhir 2010 pertumbuhan ekonomi negaranegara mulai bergerak naik," ujarnya di Jakarta kemarin.

Menurut Iman, ketiga risiko tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja ekspor dan penanaman modal di dalam negeri yang diperkirakan bakal anjlok. "Karena selama ini kontribusi ekspor terhadap GDP 30%, kalau anjlok atau stagnan akan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Dengan kondisi tersebut, Iman memprediksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan hanya sebesar 3,5%. Pertumbuhan ekonomi ini hanya akan ditopang konsumsi yang diperkirakan tumbuh sebesar 5%. Selain itu, kondisi makroekonomi lainnya juga tidak menunjukkan perbaikan. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing—terutama dolar Amerika Serikat—diperkirakan tetap berpotensi melemah.

Menurutnya, ini disebabkan kondisi Indonesia yang relatif mudah bergejolak terhadap sentimen global. Sementara untuk suku bunga SBI 3 bulan diproyeksikan 7%. Kendati begitu, kata Iman, Indonesia diuntungkan oleh pelemahan komoditas kategori perdagangan (tradable) seperti minyak sawit mentah (CPO), karet, serta minyak dan gas (migas) yang mengurangi tekanan inflasi akibat impor (imported inflation).

"Tekanan inflasi kemungkinan hanya didorong oleh kenaikan harga komoditas nontradable. Karena itu, saya lebih optimistis dibanding pemerintah, inflasi hanya sekitar 5%," jelasnya. Kondisi demikian, tambahnya, juga berdampak pada penerimaan negara baik penerimaan perpajakan maupun nonpajak.

Kinerja dunia usaha yang lebih banyak melakukan penyelamatan diri dibandingkan ekspansi atau penurunan harga komoditas, berperan besar bagi penurunan sisi penerimaan negara. Satu-satunya peluang pemerintah dalam mendorong pertumbuhan, katanya, adalah melakukan penajaman program-program prioritas sehingga belanja bisa efektif. Kriteria program prioritas, tuturnya, terutama yang banyak menciptakan lapangan kerja lebih luas.

"Penajaman bukan berarti pemangkasan belanja. Kalau begitu, nggak wise," tandasnya. Direktur Perencanaan Makro Bappenas Bambang Prijambodo mengatakan, pertumbuhan

ekonomi 2009 bakal sangat bergantung pada pembiayaan APBN. Kinerja investasi dan ekspor sulit diharapkan menjadi penopang pertumbuhan karena penurunan order dan penghentian ekspansi bisnis.

Mengutip proyeksi Bank Dunia, dia mengatakan bahwa investasi akan stagnan dan ekspor hanya tumbuh 2–3%. Kondisi ini jauh di bawah ekspektasi pemerintah, masing-masing 12%. "Adalah government spending yang nantinya diharapkan dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi ketika investasi dan ekspor terpukul,"ujarnya.

Defisit Anggaran

Iman menjelaskan, pembiayaan defisit tahun depan diperkirakan akan meningkat akibat seretnya penerimaan negara. Namun untuk menutupi pembengkakan pembiayaan, penerbitan surat utang atau penarikan pinjaman luar negeri akan sulit dilakukan.

"Pembiayaan dari market mechanism sulit, karena pasar global juga mengalami kekeringan likuiditas. Semua negara, terutama negara maju, juga berlomba-lomba menerbitkan surat utang. Jadi lupakan pasar,"katanya.

Managing Director Bank Dunia Juan Jose Daboub sebelumnya mengatakan, Indonesia seperti halnya negara-negara Asia Timur lain tidak bisa melepaskan diri dari dampak gejala perekonomian global, terutama dalam mendorong pertumbuhan dan mengurangi angka kemiskinan.

"Krisis finansial global, jatuhnya harga komoditas, dan perlambatan perekonomian global, juga memberikan tantangan buat Indonesia baik pada pasar finansial maupun outlook ekonominya," ujarnya. Menurut Daboub, dengan berbagai prakondisitersebut, pihaknya memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2009 hanya mencapai 4,4%, turun dari 6% pada 2008. (Koran Sindo)

2. NZ free trade deal offers insufficient: Agriculture Minister

New Zealand's proposal for Indonesia to scrap tariffs on imported meat and dairy products will not benefit the development of Indonesia's dairy and meat industries, Agriculture Minister Anton Apriyantono says.

"If that's the case (about what New Zealand has offered), it is too few, too little," Anton told *The Jakarta Post* via text message Tuesday.

He was responding to New Zealand's proposal to offer Indonesia doctoral scholarships, a small amount of financial assistance and a limited labor quota in exchange for Indonesia lifting all tariffs on imports of meat and dairy products.

New Zealand offered the financial assistance to train Indonesians working in the dairy and beef industries, including veterinarians, for a three-year period.

Anton said he would brush up on the details of the proposal currently being negotiated by the two countries.

The Trade Ministry is leading negotiations, with the Foreign Ministry acting as facilitator.

The two ministries might want to consult the advice of the nation's experts on the bovine industry, namely the Agriculture Ministry and other related ministries and agencies.

The negotiation is part of an auxiliary deal under the planned free trade agreement (FTA) between ASEAN and Australia and New Zealand, agreed upon on Aug. 28, which is expected to be ratified by all parties before the end of the year.

Australia, which some analysts believe has a hidden agenda in the trade deal, has put forward similar proposals, but details remain sketchy.

Beef and dairy products are currently subject to import tariffs of 5 percent on average.

Analysts say that eliminating the duty could bankrupt local dairy and meat producers, as the bovine industry is still developing.

The Agriculture Ministry estimates that 20,000 workers are directly employed in the country's dairy and meat industries.

Australia and New Zealand are the largest sellers of meat and dairy products to Indonesia.

With a population of 230 million people, Indonesia has been a key target for global meat and dairy producers.

Brazil has declared its intention to compete for a larger share of Indonesia's import market.

Sources at the Agriculture Ministry said the governments and top meat suppliers of Australia, New Zealand and Brazil were engaged in a fierce battle to become Indonesia's biggest importer of the products.

No matter which country takes the lion's share, Indonesia's meat and dairy producers are sure to suffer.

New Zealand recently dismissed speculation it had withdrawn from the negotiation table following Indonesian dissatisfaction with its trade proposal.

"New Zealand is not pulling out of the FTA," the country's deputy ambassador to Indonesia Chris Langley told the *Post*.

Trade analysts have criticized the negotiators for a lack of transparency, citing that Indonesian officials have never publicly disclosed potential gains or losses.

They said the future of Indonesia's meat and dairy industries was at risk and that such an important matter should not be decided by only a handful of officials at the Trade Ministry and Foreign Ministry and without public consultation or the involvement of legislators. (The Jakarta Post)

C. SOSBUD :

1. Indonesia to be bird flu free by 2014: Agriculture Ministry

A top Agriculture Ministry official said Wednesday Indonesia has set a target to eradicate the avian influenza virus by 2014, after implementing the second intensive phase of combative measures between 2009 and 2011.

"If all goes well, the nation will be free of the highly pathogenic bird flu virus by 2014," said Tjeppey D. Soedjana, the ministry's director general for animal husbandry, as quoted by *Antara* news agency.

Soedjana said bird flu had been eradicated from only two of Indonesia's 33 provinces so far, namely Gorontalo, in North Sulawesi, and North Maluku.

He added that West Kalimantan was scheduled to follow suit by next April.

According to Agricultural Ministry records, 294 regencies in 31 provinces have reported bird flu outbreaks this year, with a total of 46,014 poultry deaths nationwide.

More outbreaks occurred in more locations this year compared to three years ago, when 158 regions in 25 provinces were affected.

Soedjana said during the second stage alleviation measures would be intensified in these regions: West Java including Jakarta and Banten; Central Java including Yogyakarta; East Java; South Sulawesi; Lampung in Sumatra; and Bali.

The government, he added, would also implement market interventions and rehabilitative measures to support the poultry industry. (The Jakarta Post)

2. Olimpiade Sains: Indonesia Raih Prestasi Prestisius di IJSO

Pelajar SMP Indonesia yang bertanding di International Junior Science Olympiad yang berakhir Selasa (16/12) di Changwon, Korea Selatan, berhasil menyabet prestasi prestisius sebagai juara pertama dalam tes eksperimen. Predikat tes eksperimen terbaik itu mendongkrak perolehan medali yang diraih tim Indonesia.

Keenam siswa SMP yang mewakili Indonesia mampu menyumbangkan empat medali emas, empat medali perak, dan satu medali perunggu. International Junior Science Olympiad (IJSO) ke-5 itu diikuti 257 siswa dari 48 negara peserta dan lima negara sebagai pengamat.

Kompetisi sains bagi anak berumur 15 tahun ke bawah itu meliputi biologi, fisika, dan kimia yang berlangsung dalam tiga tahap, yaitu tes kompetisi, teori, dan eksperimen. Kompetisi tahun ini dinilai lebih berat dibandingkan sebelumnya karena jumlah peserta melonjak 30 persen.

Pelajar Indonesia yang meraih medali emas adalah Andhika Tangguh Pradhana (SMP Al Azhar III Bintaro Jakarta). Medali perak disumbangkan oleh Fuad Ikhanda (SMPN I Padang Panjang, Sumatera Barat), Erwin Wibowo (SMP Susteran Purwokerto, Jawa Tengah), Jessica Handojo (SMP Santa Ursula DKI Jakarta), dan Florencia Irena (SMP Santa Ursula DKI Jakarta). Adapun medali perunggu diraih Abidah Rahmah (SMP Islam Nurul Fikri, Banten).

Salah satu kelompok eksperimen Indonesia yang berhasil meraih predikat tes eksperimen terbaik menambah tiga medali emas. (Kompas)

D. HANKAM : Tidak Ada

E. HUKUM

1. Gagal Bertemu Adrian, Jaksa Gigit Jari

Tim Pencari Tersangka dan Terpidana Korupsi yang mengupayakan ekstradisi Adrian Kiki Ariawan sudah kembali dari Australia dalam rangka mengupayakan ekstradisi Adrian Kiki Ariawan. Namun, tim yang diketuai Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin gagal bertemu Adrian.

Muchtar Arifin kepada Kompas, Selasa (16/12), menjelaskan, tim yang ia pimpin telah bertemu pihak kejaksaan Australia.

"Kami meminta difasilitasi pihak kejaksaan Australia untuk bertemu Adrian. Tetapi, ia tidak mau bertemu kami," kata Muchtar.

Menurut Muchtar, sedianya jika Adrian mau bertemu, Pemerintah Indonesia akan membicarakan langsung soal upaya ekstradisi ke Indonesia. "Ya, kita lihat dulu sekarang. Mungkin dia masih shocked karena ditangkap," ujar Muchtar.

Seperti diberitakan (Kompas, 10/12), Muchtar Arifin bersama Tim Pencari Tersangka dan Terpidana Korupsi berangkat ke Australia pada 9 Desember. Mereka mengupayakan ekstradisi Adrian, yang ditangkap polisi Australia 28 November 2008, atas permintaan Indonesia.

Adrian adalah mantan Direktur Utama PT Bank Surya, yang disidangkan bersama mantan Wakil Komisaris Utama PT Bank Surya Bambang Sutrisno secara in absentia (tanpa kehadiran terdakwa). Pada November 2002, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada mereka karena terbukti mengorupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang diterima Bank Surya. Akibatnya, negara dirugikan Rp 1,515 triliun. Adrian dan Bambang juga dihukum membayar uang pengganti kerugian negara Rp 1,515 triliun dan denda masing-masing Rp 30 juta.

Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dalam perbincangan dengan Kompas akhir pekan lalu menyampaikan, pemerintah harus mengantisipasi sejumlah hal. Hal itu di antaranya langkah Adrian Kiki yang kemungkinan akan mengajukan permohonan ke pengadilan Australia untuk menolak ekstradisi dirinya ke Indonesia.

Ditanya tentang antisipasi pemerintah jikalau Adrian yang sulit diekstradisi itu akhirnya meninggal dunia di Australia seperti Hendra Rahardja, Muchtar mengatakan, hal itu tak akan terjadi.

Menurut dia, sudah ada kepastian mengenai pengembalian Adrian ke Indonesia. Bahkan, pihak Australia, menurut Muchtar, sudah proaktif membantu Indonesia. (Kompas)

2. LEGISLASI DPR Sahkan UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan

DPR tetap mengesahkan Perppu No 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), Kamis (18/12) mendatang, menjadi undang-undang (UU) meski ada fraksi yang menolak atau memberi catatan berupa minderheidsnota. Sebab, keberadaan UU JPSK akan menjadikan bank-bank di Indonesia lebih mampu bersaing dengan negara lain.

Hal itu disampaikan anggota Komisi XI DPR, Vera Febianthy (Fraksi Partai Demokrat), di Jakarta, Selasa (16/12). Menurut dia, akan sangat berbahaya kalau terjadi krisis keuangan dan perbankan sementara tidak ada jaring pengaman.

"Efek dominonya akan sangat besar. Kita memang tentu berharap tidak ada krisis. Tapi, kita kan tidak tahu. Jangan sampai kita nanti menyesal sendiri," katanya.

Wacana penetapan Perppu No 4 Tahun 2008 menjadi UU JPSK sudah mengemuka sejak lama. Bahkan, ketika melakukan fit and proper test, Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono mengemukakan hal yang sama sebagai langkah antisipasi.

"Itu artinya, selama ini pemerintah telah melakukan exercise. Mana mungkin pemerintah mau menjerumuskan negara sendiri," ucapnya.

Dalam pasal 29 Perppu No 4/2008 tersebut ditegaskan bahwa Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan dan/atau pihak yang melaksanakan tugas sesuai perppu ini tidak dapat dihukum, karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam perppu. Dengan aturan itu, berarti segala kebijakan yang diambil BI tidak terkena dampak hukum.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Oly Dondokamey (Fraksi PDIP) mengatakan, masih ada rapat kerja dengan pemerintah sebelum diputuskan apakah perppu tersebut bisa dijadikan UU. "Kami masih mendengar masukan dulu. Kalau memang sudah dijadwalkan, itu kan artinya diterima atau ditolak. Kita lihat saja kalau memang sudah diagendakan di rapat paripurna," ujarnya.

Anggota Komisi XI Walman Siahaan (Fraksi Partai Damai Sejahtera/FPDS) mengaku masih harus rapat fraksi sebelum membahas masalah tersebut di komisi. "Saya tidak bisa komentar dulu. Itu masih belum diputuskan," kata Walman.

Sebelumnya, dalam rapat kerja antara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Gubernur BI Boediono dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/12) lalu, tiga dari 10 fraksi DPR menyatakan menolak Perppu No 4 Tahun 2008 tersebut jadi UU. Ketiga fraksi itu adalah Fraksi Partai Amanat Rakyat (FPAN), Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP).

FPPP meminta Perppu JPSK dibahas ulang sesuai undang-undang yang berlaku.(Suara Karya)

F. OLAH RAGA : Tidak Ada

G. LINGKUNGAN HIDUP :

1. Kembalikan Hutan Indonesia dengan Penanaman Kembali

Dituding sebagai salah satu negara penyumbang emisi gas karbon terbesar oleh kalangan internasional, saat ini Indonesia tampaknya ingin menjungkirbalikkan tuduhan itu melalui program rehabilitasi hutan. Program ini dalam beberapa tahun terakhir semakin gencar dilakukan.

Seperti diketahui, Indonesia memiliki luas hutan tropis 120,3 juta hektare atau yang terbesar ketiga di dunia. Indonesia juga dianggap sebagai paru-paru dunia. Persoalan besar hutan Indonesia adalah terjadinya degradasi hutan dan lahan, serta deforestasi yang disebabkan pembalakan liar (illegal logging), kebakaran hutan, alih fungsi lahan, dan penjarahan hutan. Laju deforestasi 2 juta hektare per tahun membawa penilaian dunia bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang turut andil terjadinya peningkatan gas rumah kaca secara global.

Aksi penanaman serentak yang dicanangkan pada 28 November 2007 yang dilanjutkan dengan bulan menanam nasional 1 Desember 2007 dan Aksi Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon dijadikan program andalan Departemen Kehutanan (Dephut) untuk mengurangi dampak pemanasan global, meningkatkan absorpsi gas CO₂, SO₂, dan polutan lainnya, mencegah banjir, kekeringan, dan tanah longsor, serta meningkatkan upaya konservasi sumber daya genetik tanaman hutan. Melalui semangat "one man one tree" pemerintahan Yudhoyono-Kalla menargetkan penanaman serentak nasional sebanyak 230 juta pohon (setara jumlah penduduk Indonesia) pada 2009 mendatang.

Penanaman serentak pertama dilakukan dengan menanam 79 juta pohon oleh pemerintah pusat hingga daerah, ormas, serta masyarakat dengan jumlah sasaran 78.433 lokasi di seluruh Indonesia. Sedangkan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon telah menanam 10 juta pohon.

Anggaran penanaman berasal dari pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi publik. Anggaran pemerintah berasal Dana Reboisasi (DR) atau APBN-DR yang dialokasikan untuk program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan).

Dirjen Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial (RLPS), Sunaryo, mengatakan kebutuhan dana berdasarkan perhitungan harga bibit dan ongkos pemeliharaan per batang atau total Rp 10.000 per batang. "Jadi, untuk penanaman 2008 sejumlah 100 juta pohon diperlukan dana mencapai Rp 1 triliun. Dephut menyumbang 52 juta batang," jelas Sunaryo.

Upaya lainnya, untuk memulihkan sumber daya hutan telah dilakukan oleh Indonesia, antara lain melalui kegiatan Gerhan yang telah dilaksanakan sejak 2003. Target Gerhan awalnya 3 juta hektare dari 2003-2007, kemudian diperluas menjadi 5 juta hektare sampai 2009.

Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) ditargetkan seluas 5 juta hektare sampai 2009, sementara hingga 2007 pembangunan HTI telah mencapai 254 unit dengan luas 3,57 juta hektar. Pada rencana pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) ditargetkan mencapai 5,4 juta hektar sampai 2009. Sementara itu, realisasi penanaman pohon serentak secara nasional hingga akhir November 2008 telah mencapai 86 juta pohon, dari target 79 juta pohon pada 2007. Realisasi gerakan perempuan menanam mencapai 14 juta pohon dari target 10 juta pohon pada 2007.

Antisipasi Perubahan Iklim

Menteri Kehutanan MS Kaban menandatangani aksi penanaman serentak Indonesia yang dicanangkan sejak November 2007 merupakan awal dimulainya kegiatan menanam selama bulan Desember 2007 yang ditetapkan sebagai Bulan Menanam Nasional.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan momentum strategis bagi Indonesia dalam upaya mengantisipasi perubahan iklim global, degradasi dan deforestasi hutan dan lahan, serta kerusakan lingkungan lainnya. Hal itu yang mengakibatkan penurunan produktivitas alam dan kelestarian lingkungan.

Meskipun penyebab perubahan iklim dan ancaman global yang tengah dialami dunia saat ini disebabkan oleh negara-negara industri besar di dunia, namun Indonesia harus mencegah berbagai dampak krisis dari pemanasan global.

Upaya tersebut tentunya tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah saja, tetapi semua pihak juga harus terlibat. Akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia telah tumbuh kesadaran untuk menanam pohon bagi kelestarian lingkungan. Rakyat Indonesia harus terus menanam sampai lingkungan Indonesia dan dunia kembali pulih. Walaupun belum dirasakan, tetapi aksi penanaman serentak nasional adalah bukti sumbangan rakyat Indonesia bagi dunia. (Sinar Harapan)

III. ARTIKEL :

1. **Susahnya Melawan Rasisme (Oleh Tom Saptaatmaja)**

Kalau diibaratkan sebagai brand, nama Obama memang semacam brand global yang punya kedekatan dengan Indonesia. Maklum, dia pernah tinggal di negeri ini, lalu sekolah di Menteng, juga punya adik tiri berdarah Indonesia, yakni Maya Sutoro (saudara seibu). Ikatan darah itu menjadi penghubung abadi antara sosok Obama, Amerika Serikat (AS), dan Indonesia. Tak heran, saat menelepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Obama menyatakan kangen dengan nasi goreng, bakso, dan rambutan. Semua media kita serentak memuat beritanya (26/11/2008).

Memang sebelum dan sesudah memenangkan Pilpres AS pada 4 November 2008 lalu dan menjadi presiden AS ke-44 serta menjadi presiden berkulit hitam pertama, sudah banyak hal ditulis tentang tokoh berumur 47 tahun itu. Dari berbagai hal menarik tentang Obama, ada satu kalimat yang ditulis Obama sendiri yang menarik untuk dielaborasi, yakni terkait dengan warna kulitnya. Karena kedekatannya dengan kita, kita tentu merasa prihatin dengan hal ini.

Dalam buku *The Dream from My Father*, Obama menulis bahwa hidupnya diwarnai dengan cacian rasialis. Stanley Ann Dunham, ibu Obama yang kulit putih, dan Barack Hussein, ayahnya yang kulit hitam, beragama Islam, serta beristri empat, membuat Obama tak bebas dari sentimen ras. Kita sudah membaca bagaimana isu Islam dan warna kulitnya begitu dimainkan kubu Hillary dan McCain dalam upaya menuju Gedung Putih.

Syukurlah mayoritas warga AS terbukti mau memakai akal sehat mereka. Namun, jangan lupa ada sebagian kecil warga AS terus mengungkit-ungkit masalah ras ini. Bukti terbaru menunjukkan bahwa rasisme justru kian meningkat di AS sejak Obama terpilih (Kompas 20/11/2008).

“All Men are Created Equal”

Memang sebagian kecil warga kulit putih AS, khususnya pengikut Ku Klux Klan dan Council of Conservative Citizens yang masih mengagungkan superioritas ras kulit putih, merasa negara AS yang dirintis nenek moyang mereka (kaum imigran asal Eropa) sejak 200-300 tahun lalu, kini sudah dirampas oleh orang berkulit hitam seperti Obama. Kaum rasis itu juga takut dominasi warga kulit putih AS (kini 52 persen dari populasi AS) suatu saat juga akan tergeser oleh warga kulit hitam (Afro-Amerika, 24 persen), keturunan Hispanik (14 persen), dan sisanya (tujuh persen) adalah keturunan Asia, termasuk Timur Tengah.

Jangan heran spirit anti-orang hitam dan kulit berwarna lainnya sekarang justru menguat lagi, bukan malah berakhir, seperti diungkapkan para analis politik masalah internasional. Walau AS sudah punya presiden berkulit hitam, negeri itu masih belum akan bebas total dari persoalan diskriminasi atau rasisme. Apalagi dalam sejarah negeri itu, perjuangan warga kulit hitam agar hak-haknya bisa setara dengan warga kulit putih masih relatif belum begitu lama. Perjuangan itu dipelopori Martin Luther King Jr sejak 1955, tapi baru pada 10 Mei 1963 ada Perjanjian Birmingham yang melahirkan “Civil Rights Act” pada 1964 yang mengakhiri praktik segregasi atas kaum kulit hitam. Lalu, pada 1965 lahir “Voting Rights Act”, hak bagi warga kulit hitam untuk ikut

pemilu. Tragisnya, pada 4 April 1968, Martin Luther King Jr justru tewas ditembak atas motif kebencian ras.

Itulah ironi AS yang dalam deklarasi kemerdekaannya mengutip kalimat Thomas Jefferson bahwa "All men are created equal; that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights; that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness (semua orang diciptakan setara, bahwa mereka dianugerahi oleh Sang Pencipta hak pasti yang tak boleh dirampas orang lain, yakni hak akan kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan)".

Jadi, seperti diprediksi oleh Anthony Giddens dan sudah penulis sebutkan di atas, AS, setelah terpilihnya Obama, masih akan menghadapi sentimen ras. Untungnya, hukum di AS cukup tegas, ada jaminan negara secara tertulis bahwa siapa pun yang melakukan praktik rasisme akan divonis atau dihukum sesuai undang-undang.

Masalah Kita Juga

Apa yang bisa kita peroleh di sini? Lewat berbagai regulasi, pemerintah Yudhoyono juga punya good will, mengakui kesetaraan antarwarga negara. Sebagaimana "Civil Rights Act" di AS, UU Kewarganegaraan No 12/2006 yang disahkan oleh Presiden Yudhoyono pada 1 Agustus 2006 juga menjamin kesetaraan setiap warga negara, termasuk setiap etnis Tionghoa yang lahir di negeri ini sebagai WNI. UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis juga baru disahkan DPR, 27 Oktober lalu.

Namun, perjuangan menghapus diskriminasi dan rasisme serta segala bentuk kebencian rasial lainnya di negeri ini belum berarti sudah selesai. Ini perjuangan panjang dan berliku. Meski secara hukum sudah ada jaminan kesamaan atau kesetaraan, dalam praktik sering kali kita dibuat gemas menyaksikan orang-orang yang masih doyan merendahkan martabat manusia karena ras atau warna kulitnya.

Penulis kadang mengelus dada melihat mereka yang sebenarnya berpendidikan tinggi, tetapi masih melihat orang lain dengan sikap sinis dan rasis karena merasa rasnya lebih tinggi daripada yang lain.

Ironisnya, kebencian atau ketidaksukaan pada ras atau etnis lain kadang justru diperparah oleh penafsiran agama yang naif sehingga agama justru diperalat untuk mendukung atau menguatkan diskriminasi. Aneh memang bahwa ada orang yang menghina sesamanya karena rasnya justru merasa mendapat mandat atau dukungan dari Tuhan. Padahal, Tuhan merupakan "sosok" yang tidak kelihatan sehingga tidak ada satu manusia pun mampu mengenal atau mengetahui apakah Tuhan berwarna hitam, kuning, putih, atau berwarna lainnya.

Sudah pasti Tuhan akan sedih melihat anak-anak manusia ciptaan-Nya suka ribut gara-gara ras atau warna kulit. Umpatan bernada rasis atau perbuatan keji bernuansa rasis masih sering terjadi. Jadi, baik Obama maupun kita di sini, sama-sama punya panggilan mulia mewujudkan kesetaraan dan mengakhiri segala bentuk diskriminasi atau rasisme yang melecehkan keluhuran martabat manusia. (Sinar Harapan)

2. Piracy an extension of Somalia's lawless land (by Rama Anom Kurniawan)

It has been more than 15 years since the security and stability issues in Somalia were first brought to the attention of the UN Security Council through its Resolution 733 of 1992. Recent developments have also shown that this problem, which has become an international concern, is far from settled since stability in the region, Somalia specifically, remains elusive.

The waters off the coast of Somalia today are one of the world's more dangerous zones. The violent acts of piracy and armed robbery against vessels off those shores and the serious threat those acts pose to the prompt, safe and effective delivery of humanitarian aid to Somalia, to international navigation, to safe passage along commercial maritime routes and to fishing conducted there have become of grave concern to the international community.

In order to address these issues, the UNSC has responded promptly by endorsing a critical declaration, Resolution 1816 (2008).

After the adoption of Resolution 1816 (2008), France, other European countries and other international partners have taken steps to implement that resolution by establishing a military presence off the coast of Somalia. But these steps have not provided positive results: Piracy and robbery in those waters continue unabated, and have even intensified recently.

The most recent act that surprised the world was the nery hijacking of the loaded Saudi-owned crude oil tanker Sirius Star, whose ship and load was valued at nearly US\$100 million, by pirates believed to originate from Somalia.

To reemphasize the actions needed to fully eradicate piracy and armed robbery off Somalia's coast, the UN Security Council passed another resolution, 1838, on Oct. 7, 2008, intended to strengthen the previous Resolution 1816.

In light of the recent high-profile incidents, the international military presence in waters off the coast of Somalia is intended to suppress the chronic piracy.

Though well intentioned, people have misunderstood that the issue of armed robbery against ships at sea is a purely maritime issue.

This misunderstanding needs to be addressed. In Indonesia's experience, most armed robberies against ships are planned on land and goods stolen are generally sold or traded on land. Moreover, the pirates maintain a land base for their operations. Security problems in national territories, such as rebel forces, freedom fighters or paramilitaries can provoke chronic piracy and other criminal acts at sea.

Indonesia has successfully taken action against armed robbery at sea in the Strait of Malacca, in its territorial waters off the Aceh coast. As a matter of fact, prior to 2004, much of the illegal activity which occurred in the Strait of Malacca was associated with the Free Aceh Movement (GAM) and supported their cause.

The successful political settlement between Indonesia and GAM has contributed to reducing the number of illegal seizures and threats against ships in those waters.

This may be the case in Somalia where existing threats in coastal waters are not random actions at sea but generated on land. Therefore law enforcement on land and the peaceful settlement of the problems on land is necessary to minimize incidents at sea.

Notwithstanding, I believe that no country can mount a defense on its own to tackle the newly emerging nontraditional security threats. Cooperation with other states is required; in the case of Somalia, which lacks the military power to defend herself, resolution 1816 is necessary. Nevertheless, a set of principles should be kept in mind in dealing with such a cooperative effort in maritime security.

First, such cooperation should be based on respect for the sovereignty of the coastal state.

Second, any measures undertaken in the territorial waters of a coastal state regarding maritime security should be managed through a bilateral mechanism between the coastal state and other involved states.

Third, a comprehensive operation to eliminate armed robbery and other criminal acts against ships at sea should take into account the relevant operations on land, both in planning and in trading.

As a conclusion, we should not see piracy off the coast of Somalia as a stand-alone problem. Rather, it is an extension of the continuing political instability and lawlessness in Somalia itself.

Therefore, the international community should support the appeal for greater international contributions and cooperation in protecting the humanitarian convoys bound for Somalia and in repressing piracy and armed robbery at sea in conformity with international law, in particular the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, and Security Council Resolution 1816. These instruments are both necessary and adequate to address this threat. (The Jakarta Post)

IV. LAIN-LAIN : T i d a k

Ada

V. EDITORIAL :

1. Piagam Bersejarah ASEAN

Secara efektif, Piagam ASEAN mulai berlaku awal pekan ini sebagai langkah bersejarah menuju integrasi ekonomi dan politik di kawasan Asia Tenggara.

Sesuai rencana, pengumuman pemberlakuan Piagam ASEAN tetap dilaksanakan hari Senin, 15 Desember, meski lokasinya bukan di Chiang Mai, Thailand, tetapi di Sekretariat ASEAN di Jakarta. Pengumuman terpaksa dilakukan di Sekretariat ASEAN karena konferensi tingkat tinggi ke-14 di Chiang Mai ditangguhkan akibat pergolakan politik di negeri itu.

Dengan pemberlakuan secara efektif piagam, ikatan ASEAN diperkuat secara hukum. Sejak didirikan tahun 1967, ikatan ASEAN bersifat longgar. Sekalipun longgar, ASEAN telah memperlihatkan kekompakan selama 41 tahun dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan.

Organisasi regional Asia Tenggara itu juga mampu memperlihatkan kekompakan di panggung global.

Solidaritas yang sudah terbentuk selama lebih dari empat dasawarsa itu merupakan modal sangat kuat bagi ASEAN dalam berkiprah di masa mendatang. Pijakan itu kini diperkuat lagi oleh Piagam ASEAN. Sudah sering disinggung, Piagam ASEAN pada dasarnya mendorong integrasi ekonomi, memperkuat prinsip demokrasi, perlindungan hak asasi, dan pelestarian alam.

Pelaksanaan piagam akan diarahkan pada pembentukan komunitas ASEAN yang diproyeksikan akan tercapai tahun 2015, atau sekitar enam tahun dari sekarang. Banyak orang cenderung mengasosiasikan ASEAN dengan Uni Eropa sebagai komunitas yang terintegrasi secara ekonomi, bahkan memiliki mata uang tunggal euro. Namun, tidak sedikit yang mempertanyakan kemampuan ASEAN meniru langkah Uni Eropa.

Tantangan paling mencolok tentu saja kesenjangan kemajuan ekonomi di kalangan anggota ASEAN sangatlah lebar. Kesenjangan juga terjadi dalam bidang politik. Sebagian negara ASEAN sudah mengikuti proses demokratisasi, tetapi salah satu anggotanya, Myanmar, secara mencolok masih mempraktikkan kekuasaan otoriter di bawah sistem junta militer.

Namun, komitmen semua anggota untuk melaksanakan Piagam ASEAN telah memberikan optimisme bahwa penyelesaian masalah kesenjangan dalam bidang ekonomi dan politik hanyalah soal waktu. Piagam ASEAN diyakini akan menjadi stimulan dalam mendorong interaksi bagi perbaikan dalam bidang ekonomi dan politik secara individu maupun kolektif.

Sebelum melangkah lebih jauh, tentu saja ASEAN harus menghadapi ujian awal bagaimana membangun kerja sama dalam mengatasi dampak krisis keuangan global yang sedang berada di depan mata saat ini. (Kompas)

Jakarta, 17 Desember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media
Deplu